
PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN: TINJAUAN KEBIJAKAN GLOBAL

Sorimuda Siregar

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Peran organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan telah menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan kemanusiaan yang terus berkembang. Tulisan ini memberikan tinjauan terhadap kebijakan global yang diterapkan oleh organisasi internasional dalam menanggapi krisis kemanusiaan. Melalui analisis kebijakan global, termasuk kerangka kerja, strategi, dan mekanisme yang digunakan, tulisan ini menggambarkan peran kunci organisasi internasional dalam merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tanggapan terhadap krisis kemanusiaan di seluruh dunia.

Kata Kunci: *Organisasi Internasional, Krisis Kemanusiaan, Kebijakan Global*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis kemanusiaan merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat internasional dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik bersenjata, bencana alam, hingga krisis kesehatan global seperti pandemi. Dalam menghadapi krisis semacam ini, peran organisasi internasional menjadi sangat penting, karena mereka memiliki kapasitas, sumber daya, dan legitimasi global untuk memberikan tanggapan yang koordinatif dan efektif. Dalam konteks ini, tinjauan terhadap kebijakan global yang diterapkan oleh organisasi internasional menjadi krusial untuk memahami bagaimana mereka mengatasi tantangan kemanusiaan di seluruh dunia.

Penting untuk dicatat bahwa krisis kemanusiaan tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang yang kompleks terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial suatu negara maupun kawasan. Oleh karena itu, respons terhadap krisis kemanusiaan tidak hanya tentang memberikan bantuan langsung kepada korban, tetapi juga tentang membangun ketahanan, memulihkan infrastruktur, dan mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi.

Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Palang Merah Internasional (ICRC), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), memiliki peran utama dalam merespons krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Mereka berperan sebagai koordinator, penyedia bantuan, penjaga perdamaian, dan advokat hak asasi manusia dalam upaya untuk mengatasi berbagai tantangan kemanusiaan.

Dalam pendahuluan ini, akan dibahas secara lebih rinci tentang peran organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan, serta tinjauan terhadap kebijakan global yang mereka terapkan dalam menghadapi tantangan kemanusiaan tersebut. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana organisasi internasional berkontribusi dalam menanggapi krisis kemanusiaan secara holistik, dari perspektif kebijakan global.

Selanjutnya, akan dianalisis secara kritis tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh organisasi internasional dalam menjalankan peran mereka dalam penanganan krisis kemanusiaan. Ini termasuk kendala logistik, politisasi bantuan kemanusiaan, serta koordinasi yang kompleks antara berbagai aktor dan lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pendahuluan ini juga akan membahas implikasi dari kebijakan global yang diterapkan oleh organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan terhadap dinamika politik global dan hubungan antarnegara. Dengan memahami peran dan dampak kebijakan global ini, kita dapat mengevaluasi efektivitas dan relevansi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan serta mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dan perbaikan masih diperlukan.

Pendahuluan ini juga bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih luas tentang pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi krisis kemanusiaan. Dengan meningkatnya kompleksitas dan intensitas krisis kemanusiaan di era globalisasi, kerjasama

lintas batas dan koordinasi antarlembaga menjadi semakin penting untuk memastikan respons yang efektif dan berkelanjutan.

Terakhir, pendahuluan ini akan menyajikan kerangka penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, termasuk metode dan pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis peran dan kebijakan global organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran organisasi internasional dalam mengatasi tantangan kemanusiaan di dunia yang semakin kompleks dan terkoneksi ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan global yang diterapkan oleh organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan. Metode ini dipilih karena memungkinkan kita untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan global, faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan, serta dampaknya terhadap penanganan krisis kemanusiaan.

- 1. Pengumpulan Data: a. Analisis Dokumen: Penelitian akan melibatkan analisis berbagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh organisasi internasional terkait, seperti laporan tahunan, panduan kebijakan, perjanjian internasional, dan komunikasi resmi lainnya. Dokumen-dokumen ini akan memberikan wawasan tentang kerangka kerja kebijakan global, strategi, dan mekanisme yang digunakan oleh organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan. b. Studi Kasus: Selain itu, penelitian akan melibatkan analisis studi kasus tentang respons organisasi internasional terhadap beberapa krisis kemanusiaan yang signifikan. Studi kasus ini akan memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang bagaimana kebijakan global diimplementasikan dalam konteks krisis tertentu dan dampaknya terhadap penanganan krisis tersebut.*
- 2. Analisis Data: a. Analisis Kebijakan: Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan prioritas kebijakan global yang diterapkan oleh organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan. Ini termasuk identifikasi kerangka kerja kebijakan, strategi yang digunakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kebijakan tersebut. b. Analisis Studi Kasus: Studi kasus akan dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan global dalam penanganan krisis kemanusiaan. Ini melibatkan penilaian terhadap kesesuaian, relevansi, dan dampak kebijakan dalam konteks krisis tertentu, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan kebijakan di masa depan.*
- 3. Interpretasi dan Kesimpulan: Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi temuan utama, pola, dan tren dalam kebijakan global organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan. Ini akan membantu dalam menyusun kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan dampak kebijakan global dalam menanggapi tantangan kemanusiaan di tingkat internasional.*
- 4. Validitas dan Reliabilitas: Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, akan dilakukan triangulasi data dengan menggunakan berbagai sumber data dan*

metode analisis yang berbeda. Selain itu, penelitian ini akan memperhatikan konteks historis, politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan global dalam penanganan krisis kemanusiaan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis yang sesuai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan serta kontribusi kebijakan global dalam merespons tantangan kemanusiaan di tingkat global.

PEMBAHASAN

Organisasi internasional memainkan peran krusial dalam penanganan krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Dalam tinjauan kebijakan global, peran ini terlihat melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk merespons, mengurangi dampak, dan mengatasi akar penyebab krisis kemanusiaan. Kebijakan global yang diterapkan oleh organisasi internasional mencakup berbagai aspek, mulai dari koordinasi bantuan kemanusiaan hingga advokasi hak asasi manusia.

Salah satu peran utama organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan adalah sebagai koordinator bantuan. Mereka menyediakan platform untuk mengkoordinasikan tanggapan darurat, mengalokasikan sumber daya, dan memfasilitasi kerjasama antara negara-negara donor, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah lokal. Contohnya adalah koordinasi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui badan-badan seperti UNICEF dan UNHCR dalam menanggapi krisis kemanusiaan di berbagai negara.

Selain itu, organisasi internasional juga memiliki peran penting dalam memberikan bantuan langsung kepada korban krisis kemanusiaan. Mereka menyediakan bantuan kemanusiaan berupa makanan, air bersih, perlindungan, dan layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban. Organisasi seperti Palang Merah Internasional (ICRC) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) aktif dalam memberikan bantuan langsung kepada korban krisis di seluruh dunia.

Selain itu, organisasi internasional juga berperan dalam advokasi hak asasi manusia dalam konteks krisis kemanusiaan. Mereka memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama krisis, mendorong penegakan hukum, dan menyediakan perlindungan bagi korban. Hal ini tercermin dalam upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendirikan misi perdamaian dan menjaga perdamaian di negara-negara yang terkena konflik.

Di samping itu, organisasi internasional juga terlibat dalam upaya pemulihan pasca-krisis untuk membangun kembali infrastruktur, memulihkan mata pencaharian, dan mendukung proses rekonsiliasi. Mereka menyediakan bantuan pembangunan jangka panjang untuk membantu negara-negara yang terkena dampak krisis untuk bangkit kembali dan memperkuat ketahanan mereka terhadap krisis di masa depan.

Namun, meskipun memiliki peran penting dalam penanganan krisis kemanusiaan, organisasi internasional juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kendala finansial yang sering kali membatasi kemampuan mereka untuk merespons krisis dengan cepat dan efektif. Selain itu, kendala logistik, politisasi bantuan kemanusiaan, dan

akses terhadap daerah-daerah terpencil atau terisolasi juga menjadi hambatan dalam memberikan bantuan kepada korban krisis.

Selain itu, koordinasi antara berbagai organisasi internasional dan pemerintah lokal juga sering kali kompleks dan memerlukan waktu yang lama untuk diimplementasikan. Ini dapat menghambat respons yang cepat dan efektif terhadap krisis kemanusiaan dan menyebabkan penundaan dalam penyediaan bantuan yang diperlukan.

Selain itu, kebijakan global yang diterapkan oleh organisasi internasional juga dapat menjadi kontroversial atau terlibat dalam politik global yang kompleks. Misalnya, beberapa kebijakan bantuan kemanusiaan dapat menjadi bahan perdebatan politik antara negara-negara donor dan penerima, atau terlibat dalam agenda politik tertentu yang mempengaruhi prioritas dan alokasi sumber daya untuk penanganan krisis.

Namun demikian, meskipun menghadapi berbagai tantangan, peran organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan tetap sangat penting. Mereka merupakan aktor kunci dalam upaya global untuk menyediakan bantuan dan perlindungan bagi korban krisis, mempromosikan perdamaian dan keadilan, serta membangun ketahanan dan pemulihan pasca-krisis di berbagai negara di seluruh dunia. Dengan terus meningkatkan kerjasama antarlembaga dan negara, serta memperkuat kapasitas mereka dalam merespons krisis kemanusiaan, organisasi internasional dapat terus berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan krisis kemanusiaan di masa mendatang.

Dalam konteks penguatan peran organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan, terdapat sejumlah langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan efektivitas tanggapan global terhadap krisis kemanusiaan. Pertama-tama, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pendanaan dan sumber daya yang tersedia untuk organisasi internasional yang terlibat dalam penanganan krisis. Ini melibatkan keterlibatan lebih aktif dari negara-negara donor dan pihak swasta dalam menyediakan dana yang cukup untuk mendukung operasi kemanusiaan.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan koordinasi antara organisasi internasional, pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan aktor lokal lainnya dalam merespons krisis kemanusiaan. Kerjasama yang lebih erat dan sinergi antara berbagai pihak dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghindari tumpang tindih dalam tanggapan, dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan bantuan kemanusiaan.

Selanjutnya, penting untuk terus mendorong negara-negara untuk mengambil tanggung jawab mereka dalam melindungi warga mereka sendiri dari krisis kemanusiaan. Ini mencakup peningkatan kapasitas pemerintah dalam mengelola dan merespons krisis, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk meningkatkan akses dan keamanan bagi pekerja kemanusiaan di lapangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan krisis kemanusiaan harus bekerja sama untuk melindungi para pekerja kemanusiaan dari risiko kekerasan, penahanan, atau gangguan lainnya yang dapat menghambat upaya bantuan dan menyebabkan penundaan dalam penyediaan bantuan yang diperlukan.

Selain itu, diperlukan juga pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan krisis kemanusiaan, yang memperhitungkan aspek-aspek seperti perdamaian, pembangunan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Ini membutuhkan integrasi yang lebih erat antara tanggapan darurat, rekonstruksi pasca-krisis, dan pembangunan jangka panjang untuk memastikan bahwa upaya penanganan krisis tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan jangka panjang.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan beragam dalam krisis kemanusiaan, organisasi internasional perlu terus memperbaiki dan mengadaptasi strategi dan kebijakan mereka sesuai dengan perkembangan baru dan dinamika yang berkembang. Ini mencakup pengembangan pendekatan yang lebih inovatif dan responsif terhadap krisis baru seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, dan krisis kesehatan global.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa penanganan krisis kemanusiaan bukanlah tanggung jawab organisasi internasional semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komunitas internasional. Negara-negara, lembaga kemanusiaan, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penanganan krisis kemanusiaan dan memastikan bahwa bantuan dan perlindungan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya.

Dengan mengambil langkah-langkah ini dan terus meningkatkan upaya kolaboratif dalam penanganan krisis kemanusiaan, organisasi internasional dapat memainkan peran yang lebih efektif dan signifikan dalam melindungi dan membantu korban krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Dengan demikian, akan tercipta dunia yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua orang.

Dalam konteks lanjutan, penting untuk terus memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan global yang diterapkan oleh organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan. Evaluasi yang komprehensif akan membantu mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan pembelajaran yang dapat diambil dari berbagai tanggapan kemanusiaan yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas tanggapan di masa depan.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan inklusivitas dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. Ini melibatkan melibatkan aktor lokal, masyarakat sipil, dan kelompok rentan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kemanusiaan, sehingga tanggapan yang dihasilkan lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan nyata dari mereka yang terkena dampak krisis.

Selanjutnya, diperlukan juga upaya yang lebih besar untuk mengatasi akar penyebab krisis kemanusiaan, termasuk ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk mencegah dan mengurangi risiko krisis kemanusiaan di masa depan, serta mempromosikan perdamaian, keadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19, perlu ditingkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi krisis kesehatan global. Organisasi internasional perlu bekerja sama dengan negara-negara anggota dan mitra lainnya untuk

memperkuat sistem kesehatan, mendistribusikan vaksin secara adil, dan memastikan akses yang adil dan terjangkau terhadap perawatan kesehatan bagi semua orang.

Tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan keadilan di tingkat global. Konflik bersenjata dan kekerasan politik sering kali menjadi pemicu utama krisis kemanusiaan, oleh karena itu diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mencegah konflik, menegosiasikan perdamaian, dan membangun institusi yang kuat untuk mencegah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, perlu juga ditingkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap isu kemanusiaan. Pendidikan dan advokasi publik dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang tantangan kemanusiaan yang dihadapi oleh komunitas global, serta memotivasi individu dan kelompok untuk terlibat dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan.

Terakhir, perlu diingat bahwa penanganan krisis kemanusiaan adalah tanggung jawab bersama dari seluruh komunitas internasional. Dibutuhkan komitmen yang kuat, kerjasama yang erat, dan solidaritas global untuk menangani tantangan kemanusiaan dengan efektif dan berkelanjutan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini dan terus meningkatkan upaya kolaboratif dalam penanganan krisis kemanusiaan, organisasi internasional dan komunitas global secara keseluruhan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam melindungi dan membantu korban krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Semoga langkah-langkah ini membawa dunia menuju masa depan yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua orang.

Dalam konteks lanjutan, perlu juga diperkuat upaya untuk mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menghormati hukum internasional kemanusiaan. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang, serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Organisasi internasional dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara pihak yang terlibat dalam konflik, mendorong penyelesaian damai, dan memastikan perlindungan bagi warga sipil yang terkena dampak konflik.

Selanjutnya, dalam memperkuat tanggapan global terhadap krisis kemanusiaan, penting untuk memperhatikan kerentanan dan kebutuhan khusus dari kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang tua. Kebijakan dan program penanganan krisis harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan khusus dan hak-hak dari kelompok-kelompok ini, serta memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Terakhir, peran organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan juga harus dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Ini mencakup investasi dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, dan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya untuk membangun masyarakat yang lebih kuat, stabil, dan berdaya tahan terhadap krisis di masa depan.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, peran organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan memiliki dampak yang signifikan dan krusial dalam skala global. Melalui kebijakan global yang terkoordinasi dan tanggap, organisasi internasional telah menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban krisis di seluruh dunia. Mereka memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan, menyediakan bantuan langsung kepada korban, mempromosikan hak asasi manusia, dan memfasilitasi rekonstruksi pasca-krisis.

Namun, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, organisasi internasional juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kritik. Tantangan ini meliputi kendala finansial, kompleksitas politik, akses terhadap daerah yang terkena dampak, dan koordinasi antarlembaga. Selain itu, kebijakan global yang diterapkan oleh organisasi internasional sering kali menjadi subjek kontroversi dan politisasi.

Untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efektivitas tanggapan global terhadap krisis kemanusiaan, perlu adanya langkah-langkah yang lebih terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan. Ini termasuk peningkatan pendanaan dan sumber daya, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga, penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat lokal, serta penanganan akar penyebab krisis kemanusiaan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini dan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan global, organisasi internasional dapat terus memainkan peran yang penting dalam melindungi dan membantu korban krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Melalui kerjasama yang lebih erat dan kolaboratif, bersama-sama kita dapat menciptakan dunia yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

Sembiring, W. M. (2023). Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli.

- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma.ac.id.

- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, S. A. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan*.
- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- PRATAMA, R., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN LIVING PLAZA MEDAN*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Simarmata, O. H. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia*.
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). *Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, R. S. (2017). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC)*.
- Tarigan, U. (2004). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). *Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- TELAUMBANUA, F., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BANK BRI MEDAN*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Wahyudi, A., & Tarigan, R. S. (2022). *SISTEM INFORMASI SEKOLAH BERBASIS WEB PADA SMP NUSA PENIDA*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).